

### BAB III KONFLIK SURIAH DAN KEPENTINGAN TURKI DI SURIAH

Dalam BAB ini, penulis akan menjelaskan mengenai latar belakang terjadinya konflik di Suriah akibat dari efek domino peristiwa *Arab Spring*, intervensi dan kepentingan asing di Suriah, serta keterlibatan Turki dalam isu domestik Suriah.

#### A. Profil Negara Republik Arab Suriah

Suriah atau dulunya dikenal dengan sebutan negeri Syam—Syam/Sham/Sam, merupakan kesatuan wilayah yang mencakup Suriah, Yordania, Palestina, dan Lebanon sebelum akhirnya pada 1918 setiap wilayah Syam memisahkan diri—, merupakan wilayah dengan peradaban tertua di dunia. Hal tersebut dikarenakan banyaknya peradaban besar yang pernah menempati wilayah Suriah mulai dari 10.000 tahun SM salah satunya adalah peradaban Islam yang masuk pada abad ke-7. Pada masa peradaban Islam, Suriah awalnya dikuasai oleh Dinasti Umayyah I yang ibu kotanya di Damaskus, kemudian dilanjutkan kekuasaannya oleh Dinasti Abbasiyah, Ayyubiyah, Mamluk, dan Kesultanan Utsmani (Kementrian Luar Negeri, 2018).

Setelah runtuhnya Kesultanan Turki Utsmani pada 1924, Suriah yang dulunya berada dalam wilayah kekuasaan Turki Utsmani, kini telah bertransformasi menjadi negara moderen yang saat ini dikenal sebagai Republik Arab Suriah dengan luas wilayah 185.180 Km<sup>2</sup>. Wilayah perbatasan Suriah terdiri dari Turki (Utara), Irak (Timur), Laut Tengah dan Lebanon (Barat), dan Yordania serta Palestina (Selatan) (Kementrian Luar Negeri, 2018). Etnis yang mendiami wilayah Suriah terdiri dari etnis Arab (90%), Kurdi, Armenian, dan lainnya (10%) dengan

mayoritas agamanya adalah Islam (87%)—dengan pembagian 74% Islam Sunni dan 13% Islam Syiah Alawi—kemudian Kristen (10%) dan agama Druze (3%) (Citizenship and Immigration Canada, 2015).

Meskipun mayoritas Islam di Suriah adalah Islam Sunni, namun kekuasaan negara dikendalikan oleh kelompok Syiah Alawi seperti contoh Bashar al-Assad yang saat ini menjadi presiden Suriah merupakan seseorang yang beraliran Syiah Alawi. Bashar al-Assad dipilih menjadi presiden di Suriah melalui proses referendum pada 10 Juli 2000 untuk menggantikan ayahnya yang telah wafat yaitu Hafez al-Assad pada 10 Juni 2000 (Sahide, 2019).

#### **B. Konflik Suriah: Efek Domino *The Arab Spring***

Konflik yang terjadi di Suriah sampai saat ini, tidak lepas dari pengaruh efek domino dalam fenomena *Arab Spring*. *Arab Spring* atau musim semi Arab, merupakan suatu fenomena dimana terjadi berbagai revolusi demokrasi di Dunia Arab. Makna dari ‘bersemi’ dalam fenomena *Arab Spring* adalah menyebarnya nilai-nilai demokrasi dan memberikan efek domino kepada negara-negara Arab lainnya. *Arab Spring* bermula dari Tunisia yang diawali dengan aksi pembakaran diri seorang pedagang yang bernama Mohamed Bouazizi pada 17 Desember 2010 sebagai aksi protes terhadap pemberintahan ototriner Ben Ali.

Aksi bakar diri tersebut mendapat perhatian dari seluruh masyarakat domestik maupun internasional sehingga aksi yang dilakukan oleh Bouazizi menjadi pemicu dan pemersatu masyarakat untuk melakukan protes ke pemerintah secara luas dan masif. Sehari setelah aksi bakar diri Bouazizi, masyarakat Tunisia menggelar aksi

unjuk rasa dengan turun ke jalan untuk melakukan perlawanan terhadap pemerintahan Ben Ali. Aksi unjuk rasa yang masif dan diwarnai dengan unsur kekerasan, membuat aksi tersebut diliput diberbagai sosial media dan tersebar melalui internet ke seluruh dunia. Persebaran aksi protes massa di jalanan dan informasi mengenai peristiwa tersebut yang tersebar luas, dapat meruntuhkan kekuasaan otoriter rezim Ben Ali yang bertahan selama 24 tahun (Sahide, 2019).

Fenomena berakhirnya rezim otoriter Ben Ali melalui *people power*—istilah dalam politik yang menunjukkan kemampuan gerakan sosial yang bergerak secara masif (populis) yang ditujukan untuk melawan pemerintah yang sedang berkuasa—dan media massa, menjadi sorotan dan perbincangan hangat dunia pada saat itu. Peristiwa tersebut ternyata dapat membangkitkan semangat kepada masyarakat di Dunia Arab lainnya untuk melakukan perubahan.

Peristiwa *Arab Spring* tidak terjadi tanpa adanya sebab-akibat yang memengaruhi datangnya berbagai perubahan di Dunia Arab. Gerakan *people power* sebagai pembawa gelombang perubahan yang masif di Dunia Arab ditujukan kepada pemerintah/rezim yang berkuasa karena dinilai gagal untuk membenahi kehidupan rakyat baik dalam bidang ekonomi, sosial, dan politik. Perilaku para pejabat pemerintahan yang hidup dalam nilai korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta kekuasaan yang otoriter, membuat rakyat ingin menggaungkan suatu perubahan di negaranya masing-masing (Kompas, 23 Januari 2011).

### C. Kronologi Terjadinya Konflik di Suriah

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa konflik yang terjadi di Suriah merupakan efek domino dari fenomena *Arab Spring* yang terjadi di Dunia Arab dimana masyarakat Suriah menginginkan perubahan dalam pemerintahan mereka yang saat ini dipimpin oleh rezim Bashar al-Assad. Bashar al-Assad merupakan pemimpin Suriah sekaligus anak dari presiden Suriah sebelumnya, yaitu Hafez al-Assad. Keluarga al-Assad telah membangun dinasti kekuasaannya melalui Partai Ba'ath sebagai kekuatan tunggal selama lebih dari 5 dekade yang berdasarkan empat pilar rezim politiknya, yaitu klan al-Assad memiliki kekuasaan penuh di dalam pemerintahan, persatuan kelompok minoritas syiah Alawi, mengontrol seluruh aparat militer-intelijen, dan Partai Ba'ath sebagai partai penguasa tunggal dalam sistem politik. Selain itu, Bashar al-Assad mendapatkan dukungan politik dari negara Rusia, Iran, dan Tiongkok. Dengan menjaga keseimbangan keempat pilar tersebut dan dukungan yang diberikan oleh Rusia, Iran, dan Tiongkok, membuat konflik di Suriah sampai saat ini belum menemui jalan keluar.

Konflik di Suriah dimulai dari aksi protes warga sipil Suriah terhadap penangkapan 15 pelajar di kota kecil Daraa pada 6 Maret 2011. Pelajar ini ditangkap karena membuat sebuah grafiti yang bertuliskan slogan-slogan anti pemerintah yaitu *As-Shaab Yoreed Eskaat el Nizam* (Rakyat ingin menyingkirkan/menjatuhkan rezim!). Jauh hari sebelum peristiwa penangkapan tersebut, pada 26 Januari 2011, seorang warga Suriah bernama Hasan Ali Akleh melakukan aksi bakar diri di wilayah Al-Hasaka, timur laut Suriah. Aksi tersebut terinspirasi dari aksi

pembakaran Bouazizi di Tunisia yang motifnya sama karena kondisi ekonomi dan kehidupan yang semakin berat dan tertekan. Namun, aksi dari Hasan Ali Akleh masih belum bisa membangkitkan semangat perlawanan rakyat terhadap rezim Bashar al-Assad. Perlawanan rakyat terhadap rezim baru terjadi setelah peristiwa penangkapan dan penyiksaan terhadap 15 pelajar di Daara akibat menuliskan kalimat yang menentang pemerintahan (Fahham & Kartaatmaja, 2014).

Kejadian ini mengundang aksi protes masyarakat yang menuntut pembebasan anak-anak dibawah umur. Namun, aksi protes tersebut tidak ditanggapi dengan baik oleh pemerintah yang justru menembak para demonstran yang menyuarakan pembebasan terhadap pelajar yang mengakibatkan 4 orang tewas. Pada 15 Maret 2011, di bulan yang sama, terjadi demonstrasi di wilayah Banias dikarenakan pemerintah Suriah melarang penggunaan niqab/cadar bagi para guru perempuan. Pada akhirnya, aksi demonstrasi menyebar lebih luas dari Daara menuju kota-kota lainnya seperti Dayar, Al-Zor, Al-Hasaka, dan Hama. Efek dari kejadian ini mengawali fenomena *Arab Spring* di Suriah dan ditandai dengan munculnya pemberontakan di wilayah Suriah dari kelompok-kelompok oposisi Pemerintah Suriah, serta ikut terlibatnya negara-negara barat dalam konflik Suriah (Martini, York, & Young, 2013).

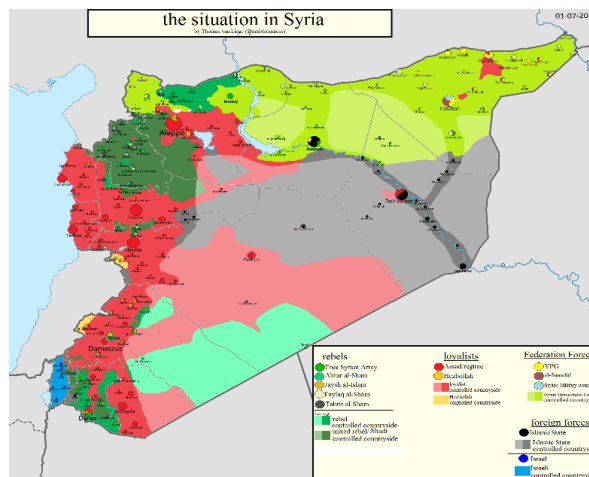
Terdapat dua macam kelompok oposisi di Suriah yaitu kelompok pro-reformasi dan kelompok gerakan Islam. Kelompok pro-reformasi terdiri dari: (1) *Free Syrian Army* (FSA) yang dipimpin oleh Kolonel Riad al-Assad pada 11 Juli 2011 yang beranggotakan dari mantan militer Bashar al-Assad yang membelot dan relawan dari rakyat sipil. Kelompok ini bermarkas di Turki, dan mempunyai misi

menggulingkan rezim Presiden Bashar al-Assad dan mengakhiri kepemimpinan Partai Ba'ath yang telah berkuasa selama lima dekade; (2) *Syrian National Coalition for Opposition and Revolutionary Forces* (SNCORF) merupakan kelompok oposisi yang beranggotakan 60 orang dan dipimpin oleh seorang akademisi Kurdi bernama Abdul Basith Saida. Tujuan gerakan kelompok ini untuk memperluas basis politik kelompok oposisi ke tingkat internasional, dan mendukung intervensi internasional untuk menggulingkan kekuasaan Bashar al-Assad; (3) *National Coordination for Democratic Change* (NCDC) yang dipimpin oleh Hassan Abdul Azhim. Meskipun NCDC memiliki tujuan yang sama dengan SNCORF, namun mereka menolak adanya intervensi asing dalam mengatasi konflik di Suriah (Herlambang, 2018).

Sedangkan kelompok oposisi yang berasal dari gerakan Islam yaitu: (1) *Jabhat al-Nusrah* (JN) yang dipimpin oleh Abu Muhammad al-Jaulani. Melalui video yang mereka rilis di YouTube pada 24 Januari 2012, mereka menginginkan hukum Islam untuk ditegakkan di Suriah, dengan kata lain mendirikan Khilafah (Sahide, 2019). Dengan adanya konflik yang tengah terjadi, mereka menjadikan kesempatan tersebut untuk menggulingkan rezim Bashar al-Assad dan mendirikan Khilafah. Pada awalnya, JN dan ISI (*Islamic State of Iraq*)—sekarang berubah nama menjadi ISIS—menjadi satu bagian komando di bawah *Al-Qaeda* dan memiliki tujuan yang sama. Namun pada akhirnya mereka berpisah dikarenakan perbedaan metode perjuangan yang mereka gunakan (Kiblat, 2015); (2) *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS) yang menganggap dirinya sebagai negara Islam yang dipimpin langsung oleh Abu Bakar Al-Baghdadi, dan mempunyai tujuan untuk

menghimbau serta menghimpun umat Islam yang beraliran sunni untuk bersama-sama berjihad melawan musuh Islam dan mendirikan negara Islam. Meskipun niat dan tujuan dari ISIS merupakan bentuk ketaatan untuk berjihad dan memerangi orang-orang non-muslim, namun yang membuat organisasi ini berbahaya adalah penyebaran pengaruh/ideologinya dengan cara yang radikal yang mana cara tersebut bertentangan dengan ajaran Islam yang sesungguhnya. ISIS juga tidak hanya menjadi organisasi agama akan tetapi merupakan organisasi dengan gerakan politik dan militer yang menggunakan ajaran radikal sebagai alat untuk melancarkan aksinya (Wahyuni, 2016).

**Gambar 3. 1: Situasi Penguasaan Wilayah dalam Konflik Suriah**



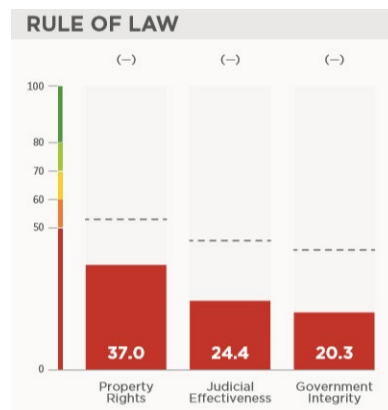
Sumber: Perry-Castaneda Library Map Collection

#### D. Akar Permasalahan Konflik Suriah

Menurut A. Muchaddam Fahham dan A.M. Kartaatmaja (2014) terdapat tiga permasalahan utama dalam konflik Suriah yaitu, *pertama*, permasalahan domestik dalam bidang ekonomi, sosial, dan politik seperti kemiskinan, pengangguran, inflasi yang tinggi, terbatasnya mobilitas sosial, kebebasan politik, dan tindakan represif dari aparat keamanan. Dalam bidang ekonomi, Suriah berada di peringkat ke-220

dengan tingkat inflasi 28.1%, peringkat ke-217 dengan tingkat pengangguran 50% pada tahun 2017, dan sebanyak 82.5% populasi di Suriah yang hidup di bawah garis kemiskinan (CIA, 2019). Dibawah ini terdapat penjelasan mengenai kondisi politik dan ekonomi di Suriah saat mengalami konflik. Data berikut diambil dari The Heritage Foundation (2019).

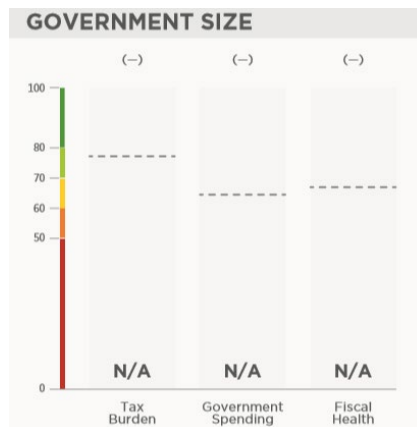
**Gambar 3. 2: Supremasi Hukum di Suriah**



Keterangan: Supremasi hukum yang rendah, dan pemerintah dengan kekuasaannya acap kali menyita atau mengambil properti dan bisnis dari lawan politiknya. Para elit dari rezim pemerintahan Partai Ba'ath yang dilindungi secara konstitusional melalui Undang-undang darurat 1963, mendominasi semua cabang pemerintahan dan dapat bertindak sewenang-wenang karena memiliki impunitas yang kuat. Hal tersebut yang membuat para elit pemerintahan melakukan pretek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Bagi masyarakat atau kelompok politik lain yang berani menentang pemerintahan Bashar al-Assad, maka pemerintah akan menindak secara keras baik dengan penangkapan, kekerasan, sampai kematian. Dengan demikian, institusi pemerintahan dibawah rezim Bashar al-Assad kekurangan akutanbilitas publik.

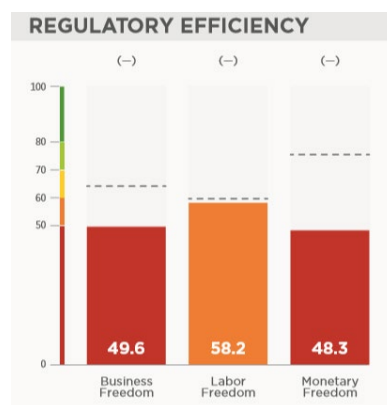


**Gambar 3. 3: Kemampuan Pemerintah Suriah**



Keterangan: Kebijakan ekonomi berfokus pada melindungi rezim dan mempertahankan kapasitas tempur militernya. Pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah Bashar al-Assad ditujukan untuk melindungi kepentingan politik rezim. Pendapatan yang didapatkan dari penghasilan SDA minyak dan pajak semakin berkurang. Dengan terbatasnya sumber keuangan dan akibat dari adanya sanksi internasional, maka keuangan rezim bergantung pada sebagian bantuan keuangan dari Iran dan pinjaman dari Rusia.

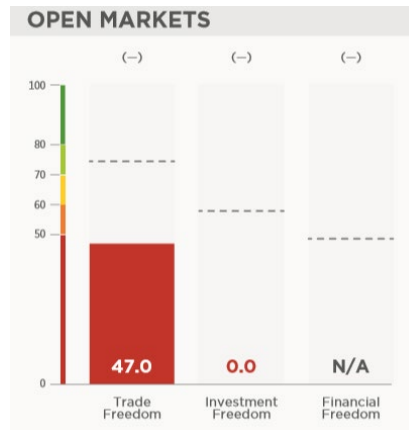
**Gambar 3. 4: Efisiensi Aturan di Suriah**



Keterangan: Sebelum terjadinya konflik, lingkungan bisnis yang memiliki kekurangan efisiensi dan transparansi telah berkurang sedikit demi sedikit.

Terbatasnya fungsi tenaga kerja hanya pada bagian sektor tertentu akibat dari campur tangan dan kontrol negara. Kemudian pemerintah telah memangkas subsidi untuk listrik, air, diesel, dan minyak yang membuat masyarakat Suriah frustrasi terhadap masalah inflasi yang merajalela terjadi.

**Gambar 3. 5: Keterbukaan Pasar di Suriah**



Keterangan: Konflik Suriah yang sedang berlangsung sampai saat ini mengakibatkan terhalangnya perdagangan internasional dan investasi untuk masuk ke Suriah. Ketidakstabilan dan represi politik yang terjadi telah menyebabkan lemahnya sistem finansial dan cadangan devisa yang hampir habis.

*Kedua*, masyarakat Suriah menginginkan reformasi pergantian pemerintahan Bashar al-Assad. Berkuasanya rezim al-Assad melalui monopoli politik Partai Ba'ath, telah berjalan selama lebih dari lima dekade. Semenjak Bashar al-Assad menggantikan ayahnya, Hafez al-Assad dan ditunjuk menjadi presiden di Suriah melalui referendum pada 10 Juli 2000, rezim Bashar al-Assad membangun pemerintahannya dengan cara otoriter meskipun pada masa awalnya ia membangun reformasi yang demokratis. Sehari setelah dilantiknya Bashar al-Assad secara

referendum, ia melakukan berbagai reformasi politik seperti contoh pemulihan secara bertahap kebebasan berbicara masyarakat Suriah dimana hak tersebut pernah dihilangkan oleh rezim pada 1958.

Setiap orang berhak untuk menyampaikan kritik dan pendapatnya kepada pemerintahan. Selain itu, terdapat kebebasan bagai sruat kabar yang mana sebelumnya diberangus selama tiga dasawarsa. Pada masa ini dikenal sebagai fenomena *Damascus Spring* dimana munculnya kelompok intelektual yang menciptakan forum-forum seperti forum politik, sosial, dan budaya yang menginginkan reformasi dan perubahan secara demokratis (Kuncahyono, 2013).

Akan tetapi, dukungan rezim Bashar al-Assad kepada para kelompok intelektual hanya bertahan sebentar. Seluruh forum-forum tersebut ditutup oleh pemerintahan dan memerintahkan untuk menangkap para aktivis yang secara lantang mengkritik pemerintah. Peristiwa tersebut terjadi pada pertengahan tahun 2001. Keputusan Bashar al-Assad untuk menutup forum tersebut dijelaskan melalui juru bicaranya yang mana menganggap kelompok intelektual atau reformis sebagai “agen barat” yang mempunyai tujuan untuk mengganggu stabilitas pemerintahan Suriah. Dengan demikian, berakhirilah fenomena *Damascus Spring* yang hanya bertahan ‘seumur jagung’.

Selain itu, rezim pemerintahan otoriter didukung oleh undang-undang darurat yang telah diberlakukan sejak 1963 dimana UU tersebut digunakan sebagai ‘senjata’ untuk meredam dan menekan kelompok anti-pemerintah yang muncul. Dengan demikian, rezim otoriter Bashar al-Assad memiliki kekuasaan untuk menindak,

menghukum, menekan, dan meredam segala bentuk aksi perlawanan yang dilakukan oleh para aktor anti-pemerintah. Meskipun pada 21 April 2011, Bashar al-Assad telah resmi mencabut UU Darurat tersebut untuk meredam aksi demonstrasi, namun masyarakat tetap menginginkan rezim untuk turun.

*Ketiga*, merupakan faktor yang sering dirujuk untuk menjelaskan konflik suriah yaitu dominasi kelompok minoritas Syiah Alawiyah dalam perpolitikan Suriah. Dominasi tersebut tidak hanya berakibat bagi deskriminasi berupa pembatasan gerak kelompok *Ikhwanul Muslimin* (IM) yang bermazhab Sunni, melainkan juga terjadinya penguasaan sektor ekonomi oleh para elit politik Syiah Alawi (Ghafur, 2012). Faktor aliran agama ini biasa dirujuk sebagai penjelas bahwa konflik yang terjadi di Suriah saat ini sebagai konflik antar paham aliran agama dalam Islam. Seperti contoh, Bashar al-Assad berasal dari kelompok Syiah Alawi, sedangkan kelompok oposisi berasal dari kelompok Sunni. Pemerintahan Bashar al-Assad didukung oleh Iran dan Hizbullah dari kelompok Syiah, sebaliknya kelompok anti-Bashar didukung oleh Arab Saudi, Turki, Qatar, JN, dan al-Qaeda dari kelompok Sunni.

Akan tetapi, menurut Dina Y Sulaeman (2013), faktor berdaan aliran dalam agama bukan menjadi penyebab utama terjadinya konflik melainkan hanya sebagai pemicu. Hal tersebut dikarenakan terlibatnya banyak aktor di luar kelompok Sunni maupun Syiah seperti kehadiran Inggris, Perancis, Amerika Serikat, Rusia, Iran, Tiongkok dan lain sebagainya. Dengan banyaknya intervensi negara yang hadir dalam konflik Suriah, membuat konflik tersebut tak kunjung berakhir. Selain itu menurutnya, ajaran Syiah dan ideologi agama tidak dijadikan basis utama oleh

rezim Bashar al-Assad, melainkan menggunakan ideologi populisme sebagai basisnya meskipun dilakukan secara otoriter. Hal tersebut dibuktikan dengan komposisi anggota elit pemerintahan rezim Bashar al-Assad yang tidak sepenuhnya diisi oleh kelompok yang berasal dari Syiah Alawi. Seperti contoh dalam komposisi pimpinan militer diisi oleh kelompok Sunni sebanyak 43% dan Syiah Alawi 37%, sedangkan dalam kementerian diisi oleh 58% Sunni, 20% Alawi, dan sisanya dari kelompok Druze, dan Kristen.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa konflik yang terjadi di Suriah disebabkan oleh berbagai macam masalah baik di domestik maupun internasional. Di dalam domestik, Suriah terjadi krisis ekonomi seperti kemiskinan, pengangguran, tingginya inflasi, dan juga krisis politik seperti maraknya KKN, terbatasnya kebebasan publik, dan tindakan represif dari aparat keamanan. Sedangkan di dalam dunia internasional, banyaknya negara yang ikut mengintervensi dalam konflik Suriah yang mana setiap negara tersebut memiliki kepentingannya masing-masing di Suriah (Fahham & Kartaatmaja, 2014).

#### **E. Intervensi dan Kepentingan Asing dalam Konflik Suriah**

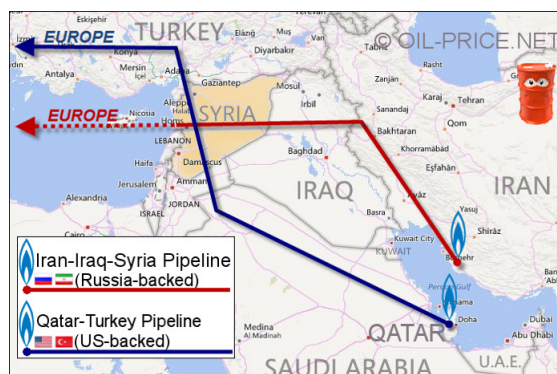
Selanjutnya, konflik ini terjadi juga disebabkan adanya intervensi negara asing yang ingin meletakkan pengaruhnya di wilayah Suriah. Campur tangan negara asing mengakibatkan konflik di Suriah tidak kunjung usai sebab negara-negara asing seperti Amerika Serikat yang berkerjasama dengan kelompok oposisi pemerintah Suriah membantu memasok senjata untuk melawan dan menggulingkan Pemerintahan Bashar Assad. Selain itu, Rusia dan Iran yang dinilai sebagai negara oposisi Amerika Serikat berada dalam posisi mendukung Bashar Assad dengan

sebab Suriah sebagai mitra bagi Rusia dan Iran. Keberadaan negara-negara ini ada yang membantu namun juga mengganggu proses perdamaian antar rakyat/kelompok militan Suriah dengan Pemerintahan Bashar Assad itu sendiri. Pada akhirnya, perang yang terjadi di Suriah dijadikan arena peperangan antar negara-negara besar dan berpengaruh di dunia (Alkaff, 2016).

### 1. Geopolitik Suriah dan Keberadaan Jalur Pipa Gas

Posisi geopolitik Suriah sebagai negara dengan infrastruktur jalur pipa gas, menjadi lokasi yang strategis bagi perekonomian di Timur Tengah dikarenakan wilayah Suriah menjadi pintu masuk dan keluar bagi jalur pipa gas antar benua. Pada 2009, Bashar al-Assad bekerjasama dengan Iran untuk membangun jalur pipa gas Iran-Irak-Suriah, setelah sebelumnya menolak untuk bekerjasama dengan Qatar untuk membangun jalur pipa gas Qatar-Arab Saudi-Yordan-Turki.

**Gambar 3. 6: Jalur Pipa Gas**



Iran menginginkan dibangunnya jalur distribusi untuk komoditi minyak dan gas ke Eropa melalui jalur pipa gas di Suriah. Hal tersebut selaras dengan kepentingan Rusia yang mana pada era Uni Soviet dulu telah menjadi mitra

kerjasama dengan Suriah. Rusia tidak ingin dominasi gasnya yang berada di Eropa menjadi terancam akibat dibangunnya jalur pipa Qatar-Suriah. Dengan adanya jalur pipa gas Qatar-Suriah, maka negara-negara di Eropa akan mendapatkan alternatif gas dengan harga yang lebih murah (Kennedy, 2016).

## 2. Kepentingan Koalisi Bashar al-Assad: Rusia, Tiongkok, dan Iran

Rusia, Tiongkok, dan Iran merupakan negara yang memberikan dukungan politik kepada rezim Bashar al-Assad. Seperti contoh Rusia dan Tiongkok melawan gerakan politik yang dilakukan oleh Amerika Serikat yang secara aktif melakukan kampanye internasional sebagai bentuk pengisolasian rezim Bashar al-Assad dan memberikan dukungan kepada pihak oposisi. Sebagai anggota Dewan Keamanan PBB, Rusia dan Tiongkok menggunakan hak vetonya untuk membela kepentingan Suriah. Mereka melarang adanya intervensi militer dari NATO di Suriah karena takut pengaruh negara-negara Barat akan semakin melebar di Timur Tengah. Khususnya bagi Rusia, dengan mempertahankan Suriah sebagai mitra ekonomi dan militernya yang paling dekat di Timur Tengah, maka akan membuat Rusia mempertahankan pengaruhnya di kawasan tersebut baik dalam ekonomi maupun militer.

Berbeda halnya dengan Iran, negara tersebut menjadikan Suriah sebagai 'benteng' pertahanan dari ancaman Israel. Iran merupakan salah satu negara yang menolak berdirinya Israel. Dengan membangun pengaruh kuat di Suriah, Iran bersama dengan Hezbollah membentuk kekuatan untuk menghadapi Israel. Meskipun secara militer Iran jauh dibandingkan dengan

Israel yang selalu mendapatkan pasokan bantuan militer dari Amerika Serikat, namun Iran mempunyai kekuatan geopolitik berupa Selat Hormuz. Iran dengan kekuatannya dapat menutup Selat Horuz, dimana apabila selat itu ditutup, maka akan terjadi krisis dalam perekonomian barat.

**Gambar 3. 7: Selat Hormuz**



*Sumber: Sindonews*

Selat Hormuz merupakan pintuk keluar dan masuknya minyak dunia berlalu lintas. Selat tersebut memiliki panjang 39 kilometer dan memiliki seperenam produksi minyak global, dan sepertiga dari pasokan gas alam cair (LNG) dunia, sehingga keberadaannya begitu penting bagi negara di dunia yang menjadi konsumen minyak (Al Jazeera, 2019). Sedangkan Iran menjadi negara yang letaknya geografisnya bertepi dengan selat tersebut bersamaan dengan Oman, dan Uni Emirate Arab. Iran pernah berwacana pada awal 2012 dimana negara tersebut ingin menutup jalur minyak di Selat Hormuz. Hal itu membuat ketegangan antara Iran dengan negara-negara Barat, dan naiknya harga minyak dunia. Dengan demikian, posisi geopolitik Iran menjadi kekuatan yang sangat vital terutama untuk menghadapi upaya ancaman dari Barat (Sahide, 2019).



## F. Keterlibatan Turki di Suriah

Terlibatnya Turki dalam konflik di Suriah dikarenakan adanya kepentingan disana yaitu mendukung pihak oposisi yang tergabung dalam SNC, SNCORF dan FSA untuk menggulingkan rezim Bashar al-Assad, dan menolong para pengungsi Suriah yang mengungsi di Turki. Selain itu, masalah antara etnis Kurdi yang mendiami wilayah Suriah bagian Utara yang berbatasan langsung dengan Turki, menjadi agenda penting pemerintahan Turki untuk terlibat dalam politik domestik Suriah.

Dalam penjelasan sebelumnya, kelompok yang tergabung dalam FSA dan SNC sebagai kelompok oposisi, mendapatkan bantuan dari negara-negara asing, salah satunya adalah Turki. Selain memberikan bantuan dana, Turki juga memfasilitasi kelompok tersebut dengan menyediakan *base camp* di Antakya untuk FSA, dan di Istanbul untuk SNC. Selain itu, Turki juga menyediakan dua *camp* militer bagi kelompok oposisi tersebut yaitu *camp 'nerve centre'* atau *The Secret Middle East-run 'nerve centre'* yang bertempat di kota Adana dan *camp Reyhanli* yang bertempat di perbatasan Turki-Suriah (Reuters, 2012). Turki juga memberikan akses untuk keluar-masuk perbatasan Turki-Suriah yang diamankan dan dijaga oleh pasukan Turki, bagi kelompok oposisi untuk menyerang pasukan militer Suriah.

Pemerintah Turki dalam forum internasional juga turut memberikan dukungan moral kepada kelompok oposisi untuk menumbangkan rezim Bashar al-Assad. Seperti contoh pada pertemuan Organisasi Kerjasama Islam (OKI) di Djibouti tahun 2012, penegasan Turki terhadap pengakuan SNC sebagai perwakilan *legitimate* masyarakat Suriah semakin kuat, dan diikuti pula oleh negara-negara

baik Arab maupun barat (The New York Times, 2012). Selain itu, Turki juga mengajak dan membujuk para negara anggota seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa yang tergabung dalam *North Atlantic Treaty Organization* (NATO) untuk mendukung kelompok oposisi Suriah dan memberikan bantuan terhadap krisis kemanusiaan dan politik yang terjadi di Suriah. Sebagai bagian dari sekutu Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis, Turki mendorong sekutunya yang menjadi Dewan Keamanan PBB tersebut untuk menjadikan fenomena konflik yang terjadi di Suriah saat ini menjadi agenda pembahasan penting.

Usaha diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah Turki kepada negara-negara barat yang berperan sebagai sekutunya, bertujuan untuk melakukan intervensi militer sebagai upaya penyelesaian konflik Suriah. Menurut pemerintah Turki, konflik tersebut dapat diselesaikan dengan cara intervensi militer, namun Turki tidak ingin bergerak sendirian. Apabila intervensi militer disetujui secara kolektif oleh banyak negara dan mendapatkan mandat langsung dari PBB, maka Turki bersedia untuk menyediakan fasilitas militer dan mengerahkan pasukannya untuk mengakhiri segera konflik Suriah. Meskipun demikian, namun keinginan Turki untuk melakukan intervensi militer belum mendapatkan persetujuan terutama dari Amerika Serikat yang masih enggan untuk melakukan intervensi militer (Luerdi, 2016).

Selain itu, terlibatnya pemerintah Turki dalam konflik suriah dikarenakan adanya masalah pengungsi. Perang yang terjadi mengakibatkan ketidakstabilan keamanan di Suriah memaksa para warga untuk mengungsi ke wilayah yang aman. Terhitung sejak April 2014, sekitar 6,5 juta warga Suriah telah meninggalkan

kediaman mereka akibat perang yang terjadi (Syafitri, 2017). Kemudian, sekitar 10% dari populasi penduduk Suriah juga telah mengungsi ke negara-negara tetangga untuk mencari perlindungan dan mengamankan diri dari perang yang terjadi. Salah satu negara yang dituju oleh para pengungsi Suriah yaitu Turki. Turki dijadikan negara tujuan karena jaraknya yang relatif dekat dan aman. Selain itu, hubungan antara Turki dengan Suriah yang juga dinilai baik membuat pengungsi memilih tujuan mereka yaitu ke Turki.

Menurut data, pada tahun 2014, terdapat sebanyak 1,6 jiwa pengungsi Suriah yang telah berbaur dengan warga Turki. Kemudian, di tahun 2015 angka pengungsi naik menjadi 2,5 juta jiwa dan di tahun 2016 meningkat dengan jumlah 3,1 juta jiwa (Syafitri, 2017). Jumlah pengungsi yang datang ini mengakibatkan Pemerintah Turki harus menghabiskan dana sejumlah 12 Billion Euro untuk menampung pengungsi sejumlah 250.000 jiwa. Karena adanya keterbatasan Pemerintah Turki untuk membiayai para pengungsi maka sejumlah 90% dari pengungsi tinggal diluar kamp dengan kebutuhan dan fasilitas yang terbatas.

Namun hal penting yang menjadi perhatian oleh Pemerintah Turki dalam menjalankan kepentingan nasionalnya di Suriah yaitu adanya permasalahan dengan kelompok etnis Kurdi tergabung dalam PKK yang berbasis di wilayah utara Suriah. Wilayah utara Suriah berbatasan langsung dengan Turki dan mayoritas etnis yang mendiami wilayah tersebut yaitu etnis Kurdi dengan presentasi 7-10% dari keseluruhan penduduk Suriah (Time, 2013). Dengan adanya kedekatan geografis tersebut antara etnis Kurdi di Turki dan Kurdi di Suriah serta kesamaan tujuan untuk membentuk wilayah otonom sendiri, hal itu kemudian menjadi alasan logis

bagi kelompok tersebut untuk mengorganisasikan gerakan pemberontakan seperti contoh munculnya kelompok PKK.

Pemberian otonomi khusus dalam bidang politik dan pemerintahan kepada etnis Kurdi di wilayah utara Suriah oleh pemerintah Suriah, merupakan salah satu kebijakan pemerintah untuk mengurangi kekuatan oposisi terutama yang muncul dari etnis Kurdi. Pemberian status otonomi khusus merupakan impian dan cita-cita para etnis Kurdi yang selama ini telah mereka perjuangkan. Dengan kebijakan memberikan status otonomi tersebut oleh pemerintah Suriah, dapat mencegah munculnya kekuatan oposisi baru yang terdiri dari etnis Kurdi mainstream.

Pemberian otonomi khusus oleh pemerintah Suriah kepada etnis Kurdi Suriah, menurut pemerintah Turki hal tersebut dapat menjadi pemicu bagi etnis Kurdi di Turki untuk menuntut hal yang sama. Sebagaimana dengan munculnya kelompok PKK, mengatasnamakan dirinya sebagai kelompok perwakilan etnis Kurdi di Turki yang menuntut pemberian otonomi khusus kepada etnis Kurdi di Turki. Bagi pemerintah Turki, pemberian otonomi terhadap etnis tertentu justru akan menimbulkan disintegrasi, hal tersebut dikarenakan Turki mempunyai konsep kebangsaan dimana setiap warga yang berasal dari etnis manapun yang tinggal di wilayah Turki, mendapatkan hak dan perlakuan yang sama oleh negara. Sehingga pemberian status otonomi tersebut tidak dibutuhkan. Adanya tuntutan otonomi dari kelompok PKK dapat memicu berbagai macam pemberontakan dan aksi-aksi teror yang dapat berdampak pada instabilitas keamanan domestik Turki (Luerdi, 2016).